

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini telah membuktikan bahwa kasus kemanusiaan yang terjadi kepada Raif Badawi memicu timbulnya ketegangan diplomatik antara Swedia dan Arab Saudi yang didasari oleh perbedaan kepentingan ideologi kedua negara. Perbedaan pandangan akan isu kemanusiaan ini kemudian memicu perubahan kebijakan luar negeri terhadap satu sama lain yang berujung munculnya implikasi politik pada level bilateral, multilateral, dan dalam politik internasional.

Ketegangan diplomatik antara Swedia dan Arab Saudi bermula dari adanya kritik Swedia atas model hukuman jurnalis Raif Badawi. Swedia mengkritik Arab Saudi memberikan hukuman “abad pertengahan” dan tidak toleran terhadap bentuk kebebasan berpendapat. Sebelumnya Arab Saudi menjatuhkan hukuman cambuk terhadap Raif Badawi atas kasus “penghinaan terhadap Islam” yang terdapat dalam forum *online* miliknya yang bernama *Free Saudi Liberals*. Kritik ini berimbas terhadap hubungan diplomatik kedua negara yang dimulai dengan insiden pembatalan perjanjian pertahanan dan keamanan, pemulangan duta besar Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, blokade pidato menteri luar negeri Swedia dalam forum Liga Arab, pencabutan visa warga negara Swedia di Arab Saudi, pembatalan kerjasama margasatwa, hingga pembatalan kerjasama lain yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Hubungan kerjasama antara Swedia dan Arab Saudi telah berjalan selama 70 tahun dan mencapai tahap yang kompleks karena bagi Swedia, Arab Saudi merupakan mitra ekonomi terbesar di luar Eropa. Kerjasama terbesar yang dilakukan terdapat pada 4 bidang utama yaitu pertahanan dan keamanan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Di bidang pertahanan dan keamanan terdapat kerjasama meliputi ekspor senjata dan peralatan militer dari Perusahaan The Wallenberg

dan The Saab, termasuk bidang pertahanan luar angkasa *Global Eye Airborne Early Warning*, dan pembangunan pabrik nuklir di Arab Saudi. Kemudian di bidang ekonomi terdapat program *Kingdom's Vision 2030* yang akan berfokus pada edukasi, kreativitas, peran perempuan, dan peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Investasi sektor silang di Arab Saudi dalam bidang *cyber city, smart city solutions*, teknologi finansial, hingga *public private partnership*. Termasuk bidang kesehatan dimana Arab Saudi melakukan impor peralatan medis Swedia dan di bidang pendidikan berupa program pertukaran pelajar dan *research agenda*.

Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa munculnya ketegangan diplomatik antara Swedia dan Arab Saudi dikarenakan terdapat kontradiksi kepentingan ideologi kedua negara dalam memandang kasus kemanusiaan Raif Badawi. Swedia merupakan negara pertama di dunia yang mengakui *freedom of press* dan menerapkan konstitusi HAM (*Konungabalk*). Implementasi HAM bahkan telah diadaptasi dalam politik luar negeri yang tertuang dalam 8 aspek utama Tujuan Politik Luar Negeri berbasis HAM. Sesuai dengan konsep kepentingan ideologi Donald E. Nuchterlin mengenai adanya faktor ideologi yang menjadi pedoman kuat bagi sebuah negara untuk menjalankan politik luar negerinya. Ideologi ini bahkan bisa menjadi acuan kuat melebihi kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan ekonomi dan politik. Insiden hukuman Raif Badawi merupakan salah satu bentuk ketidaksesuaian ideologi yang terkandung dalam tujuan politik luar negeri Swedia, sehingga negara merasa perlu memberikan respon terhadap kasus tersebut. Sedangkan Arab Saudi memandang kritik Swedia atas model hukuman warga negaranya sebagai bentuk intervensi yang mencederai Hukum *Sharia*. Dalam tujuan politik luar negeri Arab Saudi, salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk mempermosikan nilai dan ideologi *Sharia*.

Sikap konfrontasi antara Swedia dan Arab Saudi dapat dinalisa menggunakan Model Adaptif Perubahan Politik Luar Negeri James N. Rosenau. Dalam proses perubahan sikap

kedua negara (dari yang awalnya *ally* menjadi *enemy*) terdapat dua faktor utama yaitu struktural (domestik) dan internasional. Perubahan politik luar negeri Swedia terhadap Arab Saudi dipengaruhi oleh faktor internasional (berupa dukungan NGO, negara-negara Barat, para akademisi dan aktivis, serta masyarakat media sosial), faktor domestik (demonstrasi dan perbedaan opini di Parlemen Swedia) serta karakteristik Margot Wallström yang cenderung moralis dalam memandang kasus Raif Badawi. Kemudian dari sudut pandang Arab Saudi, dua faktor yang dianalisa adalah secara internasional (dukungan dari Qatar, Oman, Somalia, dan OKI) serta faktor domestik (faktor birokrasi Kerajaan Arab Saudi). Perubahan-perubahan dalam politik luar negeri Swedia dan Arab Saudi ini kemudian mendorong munculnya implikasi-implikasi di berbagai tingkat, yaitu tingkat bilateral, multilateral, dan politik internasional.

Dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, penelitian ini relevan untuk dilakukan. Selain menangkat konsep yang berkaitan dengan politik luar negeri dan konsep kepentingan nasional yang sudah umum dalam Ilmu Hubungan Internasional, penelitian ini juga melibatkan unsur norma masyarakat internasional yang erat kaitannya dengan konsep HAM Barat. Selain itu, aktor yang terlibat dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada Swedia dan Arab Saudi, namun juga terdapat aktor non-negara seperti NGO, para akademisi dan tokoh berpengaruh, serta masyarakat internasional secara keseluruhan. Aktor-aktor non-negara ini memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan kedua negara terkait kasus Raif Badawi. Sesuai dengan teori Charles Hermann, James N. Rosenau, dan Risse-Kappen bahwa sebuah keputusan politik luar negeri suatu negara didasarkan pada banyak faktor diantaranya opini publik, politik dalam negeri, sampai karakter pemimpin.

Selain itu, relevansi penelitian ini juga dapat dilihat dari analisis kepentingan ideologi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sikap negara dalam memandang suatu isu. Menurut Donald E. Nuchterlin, kepentingan nasional dibagi

menjadi 4 klausa yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan pertahanan, kepentingan tata internasional, dan kepentingan ideologi. Masing-masing dari kepentingan mempunyai porsi berbeda untuk mempengaruhi sebuah negara dalam mengambil kebijakan, tergantung pada isu atau permasalahan yang sedang dihadapi. Jika selama ini konfrontasi dalam Hubungan Internasional banyak dideskripsikan oleh para akademisi menggunakan teori dan konsep realisme Hans J. Morgenthau, penelitian ini merujuk kepada teori-teori yang dikemukakan oleh Joseph Frankel dan Nicholas Spykman. Teori Morgenthau mengenai kepentingan nasional selalu berkaitan dengan *power*, bagaimana sebuah negara mencapai *power*, atau mengenai kalkulasi untung rugi dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Namun Frankel dan Spykman berpendapat bahwa terdapat hal lain yang bisa menjadi sarana lain selain ekonomi dan politik, yaitu unsur-unsur budaya, religi, kemanusiaan, dan ideologi. Keputusan suatu negara dalam menyusun politik atau kebijakan luar negeri sangat mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai non-materiil yang sulit dijelaskan dengan konsep realisme Morgenthau.

Namun dengan beberapa temuan yang ada, penelitian ini masih mempunyai beberapa kekurangan. Pertama, mengenai data yang menjelaskan mengenai hubungan diplomatik antara Swedia dan Arab Saudi. Sulit ditemukan jurnal atau buku yang menjelaskan secara spesifik mengenai seberapa konkritnya kepentingan kedua negara yang sudah menjalin kerjasama lebih dari 70 tahun. Data yang digunakan terbatas pada data sekunder yang ditemukan dari beberapa *website* resmi negara dan jurnal yang kurang spesifik dalam merinci hubungan diplomatik keduanya. Keterbatasan data inilah yang menyebabkan sulitnya identifikasi mengenai seberapa besar kepentingan kedua negara. Padahal Arab Saudi merupakan negara raksasa yang menjalin kerjasama hampir dengan seluruh negara di dunia dan memiliki ratusan pakta kerjasama yang tidak kalah besarnya. Kedua, yaitu kurangnya sumber mengenai implikasi politik yang terjadi pasca konfrontasi kedua negara. Analisis mengenai implikasi dalam

bidang kesehatan dan pendidikan masih belum memberikan informasi yang relevan terkait pada kasus apa implikasi terjadi dikarenakan terbatasnya rujukan untuk data tersebut.

Dari seluruh temuan akademik yang sudah dijelaskan, dapat ditarik dua kesimpulan penelitian. Pertama, merujuk pada perspektif Donald E. Nuchterlin mengenai konsep kepentingan ideologi, konfrontasi diplomatik antara Swedia dan Arab Saudi tahun 2015 disebabkan adanya perbedaan ideologi dalam menyikapi kasus kemanusiaan Raif Badawi. Swedia menentang model hukuman yang diberikan oleh Arab Saudi karena salah satu kepentingan ideologi yang menjadi tujuan politik luar negerinya adalah untuk mempromosikan nilai-nilai HAM. Sedangkan Arab Saudi mempunyai ideologi *Sharia* yang menjadi dasar politik luar negeri dan menghimbau kepada semua negara di dunia untuk menghargai dan tidak melakukan intervensi terhadap penerapan Hukum *Sharia*. Kedua, merujuk pada perspektif Charles E. Hermann dan James N. Rosenau, penelitian ini menunjukkan konfrontasi yang terjadi kepada Swedia dan Arab Saudi pasca insiden Raif Badawi menunjukkan adanya pergeseran politik luar negeri yang terjadi. Perubahan sikap kedua negara ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor spesifik seperti faktor internasional, struktural (domestik) dan karakteristik pemimpin. Perubahan politik luar negeri kedua negara kemudian menimbulkan implikasi politik yang terjadi pada level bilateral, multilateral, dan politik internasional.